

### **BAB III**

## ***THREE LEGGED STOOL* MELIHAT WACANA PEMBANGUNAN GLOBAL**

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan agenda- agenda pembangunan global yang pernah disusun dan diimplementasikan selama ini. Masing- masing dari agenda tersebut memiliki model dan kebijakan pembangunan yang berbeda- beda. Hal ini terkait dengan permasalahan pembangunan yang semakin beragam dan membutuhkan respon dengan formula yang berbeda untuk mengatasinya.

Pada bab ini, penulis akan memaparkan pendapat seorang tokoh lingkungan dari Kenya, yaitu Wangari Maathai, yang merasa ragu akan agenda pembangunan global yang telah disusun selama ini. Pada bab ini pula akan ditambahkan tawaran Wangari Maathai terkait hal- hal yang fundamental dalam sebuah pembangunan yang menjadi sebuah alternatif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang dianggap akan menciptakan pembangunan yang lebih demokratis.

#### **A. Pembangunan Yang Mengecewakan**

Dunia terus mengembangkan agenda pembangunan yang diharapkan mampu mengatasi tantangan global yang semakin kompleks. Perluasan dalam dimensi- dimensi pembangunan senantiasa terus dilakukan agar dapat mengatasi tantangan pembangunan secara holistik dan berkelanjutan. Sehingga, kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

Tujuan tersebut senantiasa akan diraih ketika pembangunan yang dijalankan terdiri atas kebijakan- kebijakan yang tepat dan memiliki aspek- aspek tertentu yang menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan sebuah pembangunan. Menurut Wangari Maathai, aspek- aspek yang tertuang dalam prinsip *Three Legged Stool* merupakan aspek yang fundamental dalam menjalankan sebuah pembangunan. Aspek tersebut haruslah ada dan berjalan seimbang dalam menjalankan

pembangunan. Dalam *Three Legged Stool* ini, Maathai melihat adanya hubungan antara ruang demokrasi; pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan baik untuk sekarang maupun masa depan secara adil dan merata; dan adanya budaya damai, sebagai kunci dari kesuksesan pembangunan yang lebih demokratis.

Dalam pengimplementasiannya, *Three Legged Stool* haruslah dijalankan secara seimbang dan terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi dimensi penting dalam pembangunan menjadi seimbang dan terintegrasi. Ketika aspek tersebut berjalan seimbang, maka pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan dan memungkinkan untuk mendorong masyarakat dalam mengekspresikan kreativitas dan rasa kemanusiaan secara penuh. Namun, Ketika salah satu aspek dalam *Three Legged Stool* hilang, maka akan terjadi pembangunan yang gagal.

Sayangnya, agenda pembangunan yang selama ini dijalankan masih mengalami kegagalan di beberapa aspek. Manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sebagian besar kegagalan itu terjadi di negara- negara di Benua Afrika. Sub-Sahara Afrika adalah yang paling jauh tertinggal. Bahkan wilayah tersebut tidak memenuhi tujuan pengurangan kemiskinan global. Memang secara global angka kemiskinan memang menurun, namun dalam lingkup kawasan, hal tersebut belum mampu dicapai.<sup>61</sup> Dalih agenda pembangunan yang akan mengurangi kemiskinan secara global menjadi diragukan. Selain kemiskinan, tidak ada negara yang mampu mencapai target pengurangan tingkat kematian ibu dan pengurangan emisi karbon.<sup>62</sup>

Menurut Wangari Maathai, kegagalan tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam pengimplementasian

---

<sup>61</sup> Gibbs, D. (2015). MDG Failures. Retrieved September 27, 2017, from <https://borgenproject.org/mdg-failures/>

<sup>62</sup> Ibid.

dimensi- dimensi inti dalam pembangunan. Selama ini, pembangunan dalam pelaksanaannya telah terjadi ketimpangan di antara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Meskipun beberapa agenda telah memasukkan dimensi- dimensi tersebut dalam kebijakan pembangunan, seperti MDGs dan SDGs, dalam pelaksanaannya, pembangunan hanya melihat aspek ekonomi yang telah mendominasi dari pada aspek lain.<sup>63</sup>

Sebenarnya, Maathai tidak begitu memperlmasalahkan ketika pembangunan akan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Semua sistem politik, lembaga- lembaga negara dan nilai- nilai kebudayaan serta arah dan indikator menuju pertumbuhan ekonomi dapat dibenarkan sejauh hal tersebut mendorong kebebasan dasar (*basic freedom*), termasuk hak asasi manusia, dan kesejahteraan baik individu maupun kolektif. Namun, ketika hanya aspek ekonomi yang dijalankan maka pembangunan akan memunculkan permasalahan lebih besar.<sup>64</sup>

Maathai melihat selama ini aspek lingkungan kurang diperhatikan dalam pelaksanaan agenda pembangunan global. Padahal menurut Wangari Maathai, dalam bukunya *The Challenge For Afrika (2010)*, kesehatan ekologi merupakan hal yang sangat penting dalam meraih setiap tujuan dalam MDGs. Seperti yang Maathai sampaikan:

*“Achieving each of the eight MDGs depends heavily on healthy ecosystem; but this fact is often overlooked, and the seventh MDGs has not received as much attention as the others. In my view, however, it is the most important, and all of the other goals should be organized around it. What happens to ecosystem affect everything else...”*<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. Hal 56

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid. Hal. 240

Segala pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan dimensi lingkungan. Kesehatan ekosistem merupakan hal yang sangat menentukan dalam setiap usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan MDGs. Namun faktanya, hal tersebut masih sering dihiraukan. Pembangunan masih memilih untuk mencapai tujuan yang lain, khususnya ekonomi daripada memperhatikan kelestarian lingkungan.<sup>66</sup> Meskipun dalam agenda pembangunan, seperti MDGs, telah menerapkan tiga dimensi pembangunan, namun semua hal tersebut tidak berjalan secara seimbang.

Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, menjadi hal yang penting dalam sebuah pembangunan. Maathai melihat antara pembangunan dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut haruslah seimbang jika ingin mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang dikatakan Maathai:

*"I often asked whether a trade-off is required between the environment and development. I always say no. We need and must have both; what is important is a good balance between the two".<sup>67</sup>*

Dengan adanya keseimbangan tersebut, manfaat dari pembangunan dapat dirasakan baik untuk kehidupan sekarang maupun masa depan yang dirasakan secara adil dan pantas, termasuk untuk masyarakat terpinggir.

Sony Keraf dalam bukunya *Etika Lingkungan (2002)*, juga berpendapat sama dengan Maathai. Keraf mengatakan bahwa pembangunan sekarang ini lebih condong pada aspek ekonomi. Pembangunan bukanlah mengenai perubahan standar kehidupan material tetapi mengenai perubahan dalam kualitas hidup. Keraf menekankan pada pembangunan sebagai upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot

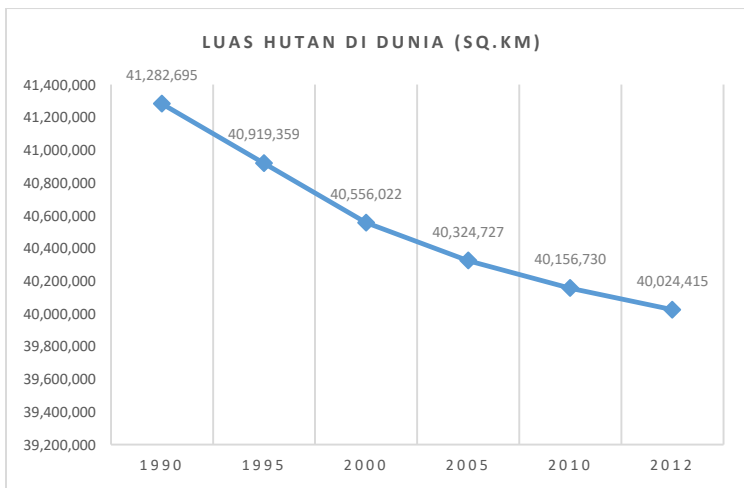
---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid. Hal 250

yang sama pada tiga dimensi utama pembangunan, yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang selanjutnya menjadi sebuah makna dari pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, ketiga dimensi tersebut tidak boleh timpang, karena dapat menimbulkan kerugian.<sup>68</sup>

Perhatian terhadap aspek lingkungan mulai berkembang ketika penyusunan SDGs. Meskipun dalam MDGs juga telah ditanamkan aspek lingkungan, namun hal tersebut masih tidak begitu diperhatikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kegagalan mencapai tujuan MDGs nomor tujuh yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Luas hutan di dunia semakin menurun dan jumlah emisi karbon dari tahun ke tahun semakin meningkat.



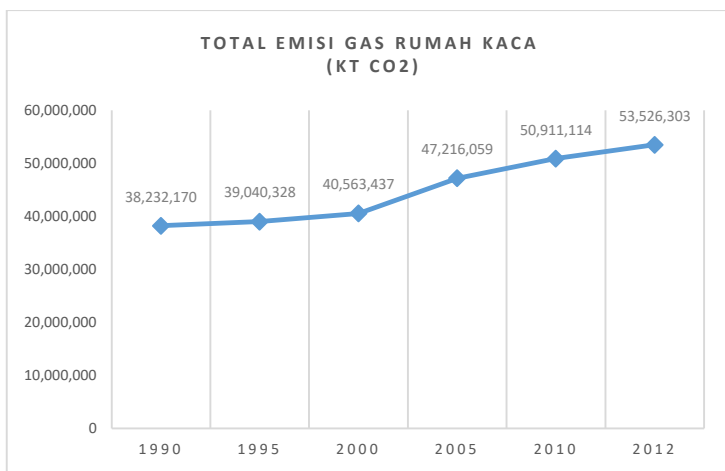
*Grafik 3.1: Grafik Luas Hutan Di Dunia<sup>69</sup>*

Grafik di atas menunjukkan bahwa luas hutan di dunia semakin menurun dari tahun ke tahun. Sangat terlihat jelas tren

<sup>68</sup> Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas. Hal. 168-175

<sup>69</sup> FAO. (2017). Forest area (sq. km) Retrieved Maret, 23, 2017, from [data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?view=chart](http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?view=chart)

dari penurunan tersebut, bahwa pada tahun 1990 luas hutan di dunia mencapai 41.282.695 km<sup>2</sup> dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 yang mencapai 40.024.415 km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa deforestasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Deforestasi terjadi karena hutan dikonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman penduduk dan kawasan komersil. Didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi, industri dan pertambangan, menjadikan pembangunan hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi saja. Alhasil, ekspansi pembangunan semakin meluas dan menjadikan konsumsi akan sumber daya alam semakin banya. Hal ini mengakibatkan jumlah emisi karbon yang semakin bertambah yang semakin mengancam Bumi.



Grafik 3.2: Total Emisi Gas Rumah Kaca<sup>70</sup>

Grafik di atas menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah emisi CO<sub>2</sub> terjadi dari tahun 1990 dengan jumlah total 38.232.170 kt hingga di tahun 2012 berjumlah

<sup>70</sup> The World Bank. (2017). Total greenhouse gas emissions (kt of CO<sub>2</sub> equivalent). Retrieved Maret, 23, 2017, from [data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE?end=2012&start=1990&view=chart](http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE?end=2012&start=1990&view=chart)

53.526.303 kt. Hal ini menunjukkan bahwa produksi akan gas rumah kaca semakin tinggi. Terlebih lagi, hal ini semakin diperparah dengan berkurangnya luas hutan dari tahun ke tahun yang seharusnya dapat mengurangi emisi yang diproduksi.

Jumlah emisi karbon dioksida secara global dapat dikatakan diluar harapan dunia. Terdapat peningkatan 50% lebih emisi CO<sub>2</sub>.<sup>71</sup> Kenaikan tersebut memiliki dampak yang membahayakan kesehatan Bumi. Tidak dapat dipungkiri jika telah terjadi berbagai permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim dengan cuaca- cuaca yang ekstrim, suhu bumi yang meningkat, es di kutub utara dan selatan mencair, meningkatnya volume air laut, semakin menipisnya lapisan ozon dan lain sebagainya.

Benua Eropa merupakan salah satu wilayah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan di Eropa terdapat beberapa negara industri yang memiliki banyak pabrik dan merupakan konsumen bahan bakar fosil yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain untuk tujuan pembangunan. Akibatnya, sepanjang dari awal abad 21, benua ini menerima dampak perubahan iklim yang sangat signifikan. Tahun 2007, Inggris mengalami musim hujan paling basah di bulan Mei, Juni dan Juli semenjak 240 tahun yang lalu. Sedangkan Yunani, mengalami musim panas paling panas dalam satu abad ini.<sup>72</sup> Pada tahun 2009, konsentrasi ozon (O<sub>3</sub>) di Eropa diperkirakan menjadi dua kali lipat daripada ketika awal industrialisasi. Konsentrasi O<sub>3</sub> yang tidak stabil akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia, seperti gangguan pernafasan dan iritasi mata. Suhu yang tinggi, radiasi matahari yang kuat dan kecepatan angin yang rendah terjadi di Eropa bagian selatan

---

<sup>71</sup> Gibbs, D. (2015). MDG Failures. Retrieved September 27, 2017, from <https://borgenproject.org/mdg-failures/>

<sup>72</sup> Fischer, T. B., & Sykes, O. (2009). The Territorial Agenda of the European Union: Progress for Climate Change Mitigation. *The Town Planning Review*, 80(1), 57–82.

selama musim panas dan selanjutnya di bagian utara Eropa konsentrasi O<sub>3</sub> lebih rendah di bagian selatan.<sup>73</sup>

India setiap tahun mengalami perubahan iklim yang ekstrim dan mengalami kabut asap dan gelombang panas yang terus meningkat. Frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem meningkat seiring dengan naiknya suhu bumi. Suhu di India telah meningkat 1.2°C sejak awal abad ke-20. Pada musim panas tahun 2010, ketika suhu rata-rata adalah 2,05°C lebih tinggi dari 1901- 1930. Tahun 2016 menjadi tahun paling panas kedua sepanjang sejarah India, kenaikan suhu hingga mencapai 1.26°C dari 1901- 1930. Pada musim dingin 2017 suhu rata-rata adalah 2,95 derajat Celsius lebih tinggi dari 1901- 1930. Akibatnya kekeringan terjadi di India bagian selatan: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka dan Kerala terkena dampak terburuk, dengan 330 juta orang berada di bawah cengkeraman kekeringan. Ditambah lagi, kondisi ini telah menelan lebih dari 300 nyawa. Selain itu, ancaman empat badai siklon menghantam India di tahun 2017.<sup>74</sup>

Dengan melihat permasalahan lingkungan yang terjadi selama ini, dapat kita lihat bahwa pembangunan belum memberikan kebijakan- kebijakan yang holistik dan seimbang. Pembangunan hanya mementingkan kepentingan ekonomi dan sosial. Aspek lingkungan hanya menjadi wajah dari pencapaian kepentingan ekonomi. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yang disebabkan oleh pembangunana itu sendiri, yaitu seperti perubahan iklim. Meskipun berbagai konverensi lingkungan tingkat dunia terus dilakukan, namun belum mampu secara signifikan merubah pola pembangunan global menjadi pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan memikirkan kembali arti keamanan dan

---

<sup>73</sup>Magnuz Engardt, R. B. (2009). Climate and Emission Changes Contributing to Changes in Near-Surface Ozone in Europe over the Coming Decades: Results from Model Studies. *Ambio: Ozone Exposure and Impacts on Vegetation in the Nordic and Baltic Countries*, 38(8), 452–458.

<sup>74</sup>N.n. (2017). From 1901 to 2017: Know how India's temperature is increasing over the years. Retrieved from <https://www.oneindia.com/india/from-1901-2017-know-how-india-s-temperature-is-increasing-o-2455548.html>



perdamaian serta memahami keterbatasan waktu yang dimiliki baik itu di tingkat nasional maupun global, sangat dibutuhkan pemikiran pembangunan yang holistik dan terintegrasi dalam menyeimbangkan setiap dimensi pembangunan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Meskipun agenda pembangunan seperti MDGs masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan global, setidaknya Wangari Maathai melihat bahwa agenda pembangunan global seperti MDGs merupakan alat yang berguna tidak hanya untuk menganalisa atau mengukur pembangunan secara umum. Namun juga sebagai alat untuk mengukur komitmen para pemimpin negara, khususnya negara industri maju dan negara berkembang dalam mengembangkan dunia yang sejahtera dan dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>75</sup>

## **B. Pembangunan Yang Demokratis dan Berkelanjutan**

*“We have to invest in the environment. We have to invest in cultures of peace, continuously and deliberately. We have to invest in cultures of democratization, of democratic space”.*<sup>76</sup>

Setiap pembangunan yang dilaksanakan haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan, haruslah memberikan manfaat bagi setiap orang secara nyata. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan keseimbangan dan integrasi yang baik antara ketiga dimensi tersebut. Negara, perusahaan dan institusi global haruslah menyadari bahwa menjamin keadilan ekonomi, kesetaraan (sosial), dan integritas lingkungan memiliki nilai yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan laba sebesar

---

<sup>75</sup> Ibid. Hal. 239

<sup>76</sup> Maathai, W. (2005). Inaugural World Food Law Distinguished Lecture - Howard University, Washington, DC - May 10, 2005. Retrieved October 5, 2017, from <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/inaugural-world-food-law-distinguished-lecture%0A>

apapaun. Jika tidak, ketimpangan ekstrem di tatanan global dan pola- pola konsumsi yang ada sekarang ini, akan terus mengorbankan lingkungan dan konsistensi perdamaian.<sup>77</sup>

Maathai melihat hubungan antara perdamaian, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan *good governance* – demokrasi - yang disusun oleh Panitia Nobel Norwegia, mengharuskan umat manusia memikirkan kembali arti perdamaian dan keamanan untuk mencapai budaya damai. Dengan kata lain, perdamaian dan keamanan akan dicapai ketika pembangunan dilaksanakan secara demokratis; menghormati peraturan hukum dan hak asasi manusia; mendorong keadilan dan kesetaraan secara nyata dan sadar; dan mengelola sumber daya yang lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi mendatang.<sup>78</sup> Maathai melihat ketiga hal tersebut penting untuk diperhatikan agar pembangunan yang dilakukan mampu menciptakan kesejahteraan dan perdamaian.

Untuk menghubungkan konsep- konsep tersebut, Maathai menggunakan *Three Legged Stool* (Bangku Berkaki Tiga) sebagai prinsip fundamental dalam melaksanakan pembangunan. Negara diibaratkan sebagai sebuah bangku dan pilar pembangunan diibaratkan sebagai kaki dari bangku tersebut. Kaki- kaki bangku tersebut adalah: pertama, adanya ruang demokrasi; kedua, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan baik untuk sekarang maupun masa depan secara adil dan merata; dan ketiga, adanya budaya damai (*cultures of peace.*)<sup>79</sup> Ketiga kaki tersebut merepresentasikan tiga pilar utama untuk menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan stabil dalam sebuah pembangunan.<sup>80</sup>

Setiap kaki atau pilar disusun untuk saling menguatkan satu sama lain. Sehingga setiap permasalahan dapat

---

<sup>77</sup> Maathai, W. (2012). *Gerakan Sabuk Hijau*. Jakarta Pusat: Marjin Kiri.

<sup>78</sup> Maathai, W. (2008). *Unbowed*. London: Anchor Book. Hal.294

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. hal. 56-

diselesaikan secara bersama- sama dan simultan. Seperti dalam pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab yang dibagikan secara adil, hanya akan dicapai jika ada sebuah ruang demokrasi, dimana semua hak dihargai. Di negara yang diktaktor atau yang menganut sistem partai tunggal, sumber daya alam tidak dapat dibagi secara adil dan berkelanjutan, karena pemimpin politik mereka cenderung lebih mementingkan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, kroni- kroni dan pendukung mereka. Ketika ruang demokrasi telah dibentuk, maka budaya damai (*Culture of Peace*) akan terbentuk dan berkembang. Ketika ketiga pilar tersebut tidak diterapkan, maka perdamaian akan sukar didapat dan lebih banyak konflik yang akan terjadi.<sup>81</sup>

Selanjutnya, kestabilan bangku akan terus terjaga ketika ditopang oleh tiga kaki bangku yang kokoh, dimana dari konsep tersebut mengkondisikan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan. Bangku yang ditopang dengan pilar- pilar tersebut merepresentasikan sebuah masyarakat dengan prospek pembangunan yang stabil. Namun ketika salah satu kaki itu hilang, bangku itu menjadi tidak stabil. Sehingga ketidakstabilan dan kegagalan dalam menjalankan pembangunan di sebuah negara akan terjadi. Maathai menambahkan, meskipun dalam sebuah pembangunan telah terdapat tiga aspek fundamental pembangunan, masih dirasa perlu untuk memperhatikan adanya keseimbangan dalam mengimplemenasikan ketiga aspek itu. Pengimplementasian ketiga aspek tersebut tidak boleh timpang. Jika hal itu terjadi, maka dapat menimbulkan kerugian.<sup>82</sup>

Pilar demokrasi, pilar lingkungan dan pilar perdamaian, sangat penting untuk dikelola secara seimbang. Jika melihat konflik yang terjadi selama ini, konflik tersebut lebih disebabkan karena ketiga pilar dalam *Three Legged Stool* tidak dikelola dengan baik dan seimbang baik di tatanan nasional,

---

<sup>81</sup> Ibid. hal 57

<sup>82</sup> Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas. Hal. 168-175

kawasan maupun global. Ketika sebuah negara bersandar terhadap tiga pilar tersebut, maka akan membuka kesempatan untuk melakukan pembangunan dan negara akan merasa terlindungi dan aman.<sup>83</sup> Seperti yang disampaikan oleh Maathai, bahwa:

*“In many regions, not least my own, many countries are resting on two legs, some are resting on one leg, and some have no legs at all. We know how desperate the situation can be when the basin is literally on the ground. No development can take place. . . .”<sup>84</sup>*

Memiliki bangku yang stabil berarti menjamin sebuah pembangunan yang holistik; menempatkan sebuah prioritas pemerintah yang demokrasi dan menghormati HAM atau hak yang lainnya; penggunaan semua sumber daya yang adil, bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan mengelola urusan negara dengan cara yang bertanggung jawab. Ketika semua aspek tersebut berada pada tempatnya, negara akan memiliki stabilitas, perdamaian, dan pembangunan.<sup>85</sup> Masyarakat akan merasa aman ketika ketiga pilar tersebut berada di tempatnya – bahwa negara mereka memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang kuat, distribusi sumber daya yang adil, dan budaya damai yang kuat – sehingga masyarakat teredukasi, produktif dan kreatif. Pada situasi ini, masyarakat tidak hanya menyambut baik adanya pembangunan, tetapi juga mampu mengendalikan sendiri pembangunan itu. Hal ini dikarenakan baik secara individu maupun kolektif, masyarakat merasa memiliki kesempatan untuk berkontribusi.

Selain itu, sebuah bangku yang aman atau dalam hal ini sebuah negara yang stabil akan menarik hati berbagai pihak seperti negara-negara maju, lembaga pembangunan

---

<sup>83</sup> Maathai, W. (2005). Inaugural World Food Law Distinguished Lecture - Howard University, Washington, DC - May 10, 2005. Retrieved October 5, 2017, from <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/inaugural-world-food-law-distinguished-lecture%0A>

<sup>84</sup> Opcit.

<sup>85</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. hal. 58

internasional - PBB, WTO dan Bank Dunia-, MNC, dan NGO untuk bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan di negara tersebut. Seperti bangku yang stabil akan menyediakan lingkungan dimana pemerintah dapat menerima dana bantuan dari berbagai pihak - seperti lembaga peminjaman, atau sumbangan swasta - dan menggunakan dana tersebut secara bertanggung jawab – bebas korupsi – untuk keuntungan masyarakat banyak. Namun, jika kondisi bangku tersebut tidak stabil, maka bantuan pembangunan akan sukar didapat. Bahkan jika bantuan tersebut tetap diberikan dengan kondisi negara yang tidak stabil, maka hal itu hanya akan memperburuk pembangunan. Menurut Maathai, ketika ketiga pilar itu tidak stabil, dan bekerja sama dengan lembaga- lembaga tersebut serta tidak peduli seberapa banyak bantuan yang mereka berikan, maka bantuan tersebut hanya akan berdampak sementara, menjadi sia- sia, atau malah menambah ketidakstabilan dalam masyarakat.<sup>86</sup> Hal tersebut seperti yang terjadi di Afrika. Bantuan pembangunan yang diberikan tidak mampu membantu mengangkat masyarakat Afrika dari jerat kemiskinan karena tiga pilar pembangunan tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat pilar- pilar dalam *Three Legged Stool* dalam pelaksanaan pembangunan di setiap negara.

## 1. Ruang Demokrasi

*“The other is that of democratic space, where rights are respected—women’s rights, human rights, environmental rights, children’s rights, where there is space for everybody, where minorities and the marginalized can find space.”<sup>87</sup>*

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Maathai, W. (2005). Inaugural World Food Law Distinguished Lecture - Howard University, Washington, DC - May 10, 2005. Retrieved October 5, 2017, from <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/inaugural-world-food-law-distinguished-lecture%0A>

Sebuah pembangunan perlu memperhatikan aspek demokrasi yang berlangsung dalam sebuah negara. Menurut Maathai, demokrasi dalam pengertian ini lebih kepada penghormatan terhadap berbagai hak, baik itu hak asasi manusia, hak wanita, hak anak, hak lingkungan dan hak lainnya yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Maathai menekankan bahwa demokrasi tidak hanya diartikan sebatas *voting* saja, namun demokrasi juga diartikan sebagai peningkatan kapasitas lembaga pemerintah maupun *non-pemerintah*, dalam menyediakan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat, dan mampu memberdayakan masyarakat menjadi *partner* yang aktif dalam pembangunan. Demokrasi juga berarti perlindungan terhadap hak-hak minoritas; parlemen yang efektif dan benar-benar sebagai perwakilan masyarakat; pengadilan yang *independent*; adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan; kebebasan pers dan media masa; kebebasan berkumpul; kebebasan dalam mempraktikkan agama; aktivitas masyarakat sipil tanpa adanya intimidasi.<sup>88</sup>

Pemberian hak secara merata seperti pemberian pelayanan dasar bagi masyarakat sangatlah penting bagi keseimbangan sebuah pembangunan. Mahbub Ul Haq yang merupakan ekonom dari Pakistan-pun juga berpendapat demikian. Kehidupan manusia tidak sepenuhnya akan bergantung pada ekonomi saja. Oleh karena itu, pembangunan harus lebih dari sekadar perluasan pendapatan dan kekayaan saja. Maka dari itu, kesejahteraan dapat dicapai ketika negara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menyediakan kebutuhan sosial seperti pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. Dengan demikian para pengambil kebijakan perlu memperhatikan pentingnya hubungan antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih fokus untuk berkontribusi pada pengembangan manusia, pengurangan kemiskinan secara jangka panjang dan berkelanjutan. Alhasil pembangunan

---

<sup>88</sup> Opcit. Hal 55-56

mampu menyediakan lingkungan untuk masyarakat untuk menikmati hidup yang panjang umur, sehat dan kreatif.<sup>89</sup>

Permasalahan yang dialami oleh negara biasanya terjadi karena negara tersebut tidak mampu untuk memberikan dan menghormati hak-hak dasar masyarakat secara merata. Masyarakat akan terancam ketika hak-hak mereka tidak terpenuhi. Selanjutnya berbagai permasalahan akan dialami oleh masyarakat yang mengakibatkan ketidakstabilan kondisi negara tersebut yang berpengaruh pada kesuksesan pembangunan yang dilakukan oleh negara, seperti masalah kelaparan.

Kelapara biasanya bukan merupakan akibat langsung dari kekurangan pangan melainkan apa yang Amartya Sen sebut sebagai “kegagalan pemberian hak”. Ini berarti ketika orang kehilangan kemampuan mencukupi pangan sendiri karena proses modernisasi, mereka harus menukarkan kekuatan kerja mereka dengan pangan. Jika masyarakat gagal dalam hal ini, mereka tidak akan memiliki apapun yang dapat diharapkan, selain subsidi pangan dari negara. Namun, ketika negara mendapatkan ancaman lain, seperti pemberontakan dari dalam atau invasi dari luar, maka subsidi pangan bisa saja tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan dana yang digunakan untuk subsidi pangan akan dialihkan untuk mengatasi ancaman tersebut. Dapat dikatakan bahwa negara mengalami kegagalan dalam memenuhi hak masyarakat karena gagal memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Akhirnya, dengan kondisi tersebut, sebuah negara memerlukan bantuan internasional untuk mengatasi permasalahan itu. Namun, dalam hal ini bantuan internasional dibutuhkan untuk bertahan hidup bukan untuk melaksanakan pembangunan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Baru, S. (1998). Mahbub ul Haq and Human Development: A Tribute. *Economic and Political Weekly*, 33(35), 2275–2279. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/440712>.

<sup>90</sup> Hettne, B. (2001). *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Amartya Sen, yang merupakan ekonom dari India memiliki pandangan yang sama dengan Maathai mengenai pembangunan, bahwa hak- hak setiap masyarakat perlu dihormati dalam pembangunan sebuah negara. Dalam pemikirannya, Sen mengaitkan pembangunan dengan kebebasan, sehingga pembangunan diartikan sebagai perluasan dari kebebasan nyata yang dinikmati masyarakat (*development can be seen as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*).<sup>91</sup> Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kebebasan yang nyata, maka unsur- unsur penghilang sumber kebebasan harus dihilangkan seperti kemiskinan; miskinnya kesempatan ekonomi; dan pengabaian fasilitas publik sebagaimana halnya intoleransi atau tindakan berlebihan dari suatu negara yang menindas masyarakat.<sup>92</sup>

Memandang pembangunan sebagai sebuah perluasan kebebasan (*expansion of freedom*), Sen melihat hal tersebut dengan dua sudut pandang, yaitu sebagai tujuan utama (*the primary end*) dan sarana pokok (*the principal means*). Kebebasan sebagai tujuan utama dapat disebut sebagai peran konstitutive (*constitutive role*) yang berhubungan erat dengan pentingnya kemerdekaan yang sesungguhnya (*substantive freedom*) dalam rangka memperbaiki kehidupan manusia. Hal ini seperti kemampuan dasar dalam mencegah terjadinya pengurangan hak- hak dasar untuk memperoleh apa yang dibutuhkan, seperti kelaparan, kekurangan gizi, cacat, kematian pada usia dini, sama halnya kemerdekaan yang berkaitan dengan kesempatan untuk dapat membaca dan menulis, menikmati keterlibatan dalam aktivitas politik, kebebasan berbicara tanpa sensor, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pembangunan merupakan proses memperluas ruang kemerdekaan manusia, dan penilaian terhadap pembangunan

---

<sup>91</sup> Sen, A. (2006). Development as Freedom: An India Perspective. *Indian Journal of Industrial Relations*, 42(2), 152–169.

<sup>92</sup> Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu- Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service). hal 72.



haruslah didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut.<sup>93</sup>

Selanjutnya yang kedua, sudut pandang terkait kebebasan sebagai sarana pokok memperluas kebebasan (peran instrumental) merupakan kemerdekaan yang bersifat instrumental yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mencapai kemerdekaan secara penuh. Kemerdekaan yang bersifat instrumental ini terdiri atas beberapa aspek: pertama, kebebasan politik, yaitu terkait hak-hak sipil yang mengacu pada peluang rakyat untuk menentukan siapa yang memerintah dan dasar- dasar pemerintahan tersebut, termasuk di dalamnya seperti melakukan pemeriksaan dan mengajukan kritik terhadap pemegang kekuasaan; memiliki kebebasan mengungkapkan sikap politik dan adanya kebebasan pers tanpa sensor, kebebasan memiliki partai- partai politik yang tersedia, dan sebagainya. Singkatnya kebebasan politik berkaitan dengan demokrasi politik dalam pengertian luas. Kedua, kesempatan- kesempatan ekonomi, yang merujuk pada ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk menggunakan sumber ekonomi untuk tujuan konsumsi, produksi dan pertukaran. Jika dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, maka pembangunan tersebut seharusnya meningkatkan pendapatan dan kekayaan suatu negara. Dalam hal ini, Sen menjelaskan bahwa hal tersebut harus mampu mencerminkan terjadinya penguatan hak- hak ekonomi penduduk. Sehingga dapat dikatakan adanya hubungan antara kekayaan dan pendapatan nasional, dengan pemenuhan hak- hak ekonomi penduduk pada sisi yang lain. Sehingga masalah pembagian dan pemerataan pendapatan menjadi hal yang penting, bukan seperti pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan ketimpangan. Ketiga yaitu kesempatan- kesempatan sosial. Hal ini berkaitan dengan pengaturan- pengaturan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati pelayanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan lain- lain yang mempengaruhi

---

<sup>93</sup> Ibid. hal 72-73

terciptanya kemerdekaan yang sesungguhnya bagi semua orang untuk hidup secara layak. Selanjutnya, yang keempat yaitu adanya jaminan keterbukaan. Sarana ini merupakan kebutuhan akan adanya keterbukaan yang diharapkan semua orang, yakni kemerdekaan untuk saling berurusan satu sama lain dengan jaminan adanya keterbukaan dan kejelasan. Jika hal ini tidak dapat dicapai maka dapat mempengaruhi instrumen yang ketiga. Terakhir adalah perlindungan keamanan, dimana menyediakan jaringan pengamanan sosial sebagai usaha untuk mencegah penduduk yang menjadi korban menderita semakin parah.<sup>94</sup>

Negara yang demokrasi merupakan negara yang mampu menjalankan pembangunan dengan baik. Dengan adanya demokrasi, maka dalam proses pembangunan akan melibatkan masyarakat dan dapat lebih menjamin hak-hak masyarakat. Demokrasi memberikan ruang untuk masyarakat sendiri untuk menjadi kreatif, untuk dihormati, untuk merasa baik, untuk bermimpi dan untuk beraspirasi.<sup>95</sup> Distribusi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tidak dapat didistribusikan secara adil dan merata kecuali terdapat ruang demokrasi di negara tersebut, dimana pemerintah dan masyarakat saling menghargai tata peraturan dan hak asasi manusia. Selain itu, demokrasi juga dibutuhkan untuk menyokong perdamaian di suatu negara dengan menciptakan negara yang stabil dan aman.<sup>96</sup> Jika telah memiliki tata kelola yang demokratis, maka masyarakat dan pemerintah mampu mendorong terselenggaranya budaya damai, sehingga masyarakat dapat menemukan sebuah lingkungan yang damai untuk melaksanakan aktivitas mereka.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Ibid. hal 73- 74

<sup>95</sup> Maathai, W. (2005). Rise Up and Walk - The Third Annual Nelson Mandela Lectur - Johannesburg, South Africa - July 19, 2005. Retrieved October 5, 2017, from <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/rise-up-and-walk%0A>

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Maathai, W. (2006). Sustained Development, Democracy, and Peace in Africa. Retrieved October 5, 2017, from <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/sustained-development-democracy-and-peace%0A>

## 2. Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

*“It was a way of urging us to make a mind-shift in the way we think about security, in the way we think about peace, and to understand that you cannot achieve peace without looking at the environment.”<sup>98</sup>*

Pilar selanjutnya dalam *Three Legged Stool* adalah pilar yang lebih melihat pada kondisi ekosistem. Lingkungan perlu untuk dikelola secara berkelanjutan, adil dan secara transparan. Sumber daya yang terkandung didalamnya harus dibagi secara merata dan bertanggung jawab. Kita tidak dapat mencapai perdamaian tanpa melihat kondisi lingkungan - ketika keamanan menjadi jalan untuk mencapai sebuah perdamaian. Oleh karena itu, dalam pilar kedua *Three Legged Stool* dilambangkan adanya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, baik untuk kehidupan sekarang maupun masa depan yang dilakukan secara adil dan pantas, termasuk untuk masyarakat terpinggir. Maathai melihat pembangunan dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut haruslah seimbang jika ingin mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh Maathai:

*“I often asked whether a trade-off is required between the environment and development. I always say no. We need and must have both; what is important is a good balance between the two.”<sup>99</sup>*

Jika pembangunan yang dilakukan tidak disertai dengan adanya perhatian terhadap lingkungan, maka akan menciptakan *maldevelopment* atau pembangunan yang salah

---

<sup>98</sup> Maathai, W. (2005). Inaugural World Food Law Distinguished Lecture - Howard University, Washington, DC - May 10, 2005. Retrieved October 5, 2017, from <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/inaugural-world-food-law-distinguished-lecture%0A>

<sup>99</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. Hal.250

seperti apa yang disampaikan oleh Vandana Shiva. Pembangunan tersebut hanyalah sebuah proses eksploitasi dan dominasi terhadap perempuan dan alam.<sup>100</sup>

Dala buku Sony Keraf, *Etika Lingkungan (2002)*, juga dipaparkan salah satu teori ekosentrisme yang terkenal adalah teori *deep ecology* (DE) yang dikenalkan oleh Arne Naes. Teori ini melihat pentingnya prinsip- prinsip moral etika terhadap lingkungan yang harus diterjemahkan dalam aksi yang kongkret. Etika ini merupakan etika yang tidak berpusat pada manusia (Antroposentrisme), namun berpusat pada makhluk hidup secara menyeluruh dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, serta mendorong gaya hidup yang selaras dengan alam dan politik serta memperjuangkan isu- isu lingkungan dan politik.<sup>101</sup>

Lingkungan dipandang memiliki nilai dan kepentingan, seperti halnya manusia, oleh karena itu, penghormatan atau perilaku menghargai lingkungan harus dilakukan agar tercipta harmonisasi dalam kehidupan. Pola hidup yang menghargai alam - mengurus dan menjaga alam - bersumber dari pemahaman dan kearifan bahwa segala sesuatu di dalam alam semesta mempunyai nilai, tidak hanya manusia yang memiliki nilai dan kepentingan yang harus dihargai. Prinsip- prinsip menghargai lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan kongkret. Teori ini juga mengajak semua orang untuk melakukan perubahan mendasar di semua bidang untuk menyelamatkan lingkungan. Kepentingan manusia bukan lagi satu- satunya kepentingan yang harus diperhatikan, namun kepentingan seluruh komunitas ekologi. Selain itu, kepentingan tersebut lebih kepada kepentingan jangka panjang bukan jangka pendek.<sup>102</sup>

Ketika dihadapkan pada sebuah permasalahan, dalam hal ini kerusakan lingkungan, teori ini berusaha melihat akar permasalahan secara komprehensif dan holistik, untuk

---

<sup>100</sup> Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid.

kemudian mengatasinya secara mendalam tidak hanya secara teknis saja.<sup>103</sup> Jika dikaitkan dengan pembangunan yang dewasa ini sedang menghadapi permasalahan lingkungan, maka pembangunan yang dilakukan haruslah menyentuh akar permasalahan dari sisi lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, bukan hanya aspek pembangunan manusia dan ekonomi saja yang diperhatikan, namun kelestarian lingkungan juga harus mendapat perhatian yang istimewa.

### 3. Budaya Damai

Kaki ketiga dalam *Three Legged Stool* adalah pilar budaya damai (*cultures of peace*), dimana hal ini terdiri dari adanya keadilan, penghormatan, perasaan keharuan, kemauan untuk memaafkan, balas budi dan keadilan. Budaya damai sangat dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang aman dan stabil dalam negara. Pilar ini memiliki peran untuk menanamkan nilai keharmonisan dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Ketika hubungan masyarakat dan pemerintah harmonis dan dapat saling menghargai satu sama lain, maka akan tercipta perasaan aman dalam menjalankan aktivitas dan menjadikan masyarakat lebih kreatif dan produktif. Terlebih lagi, dengan situasi tersebut, masyarakat akan lebih mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa dihargai oleh pemerintah dan sadar akan manfaat yang akan diterima dalam pembangunan yang dijalankan pemerintah. Dengan demikian, pembangunan yang mendapat dukungan dari masyarakat akan berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

Maathai menekankan bahwa peran masyarakat memang sangat penting dalam mencapai kestabilan pilar tersebut. Tanpa adanya partisipasi masyarakat sipil yang aktif, pembangunan yang berkelanjutan dan merata akan menjadi

---

<sup>103</sup> Ibid.

sirna. Pilar- pilar dari bangku tersebut tidak akan tersusun dan kuat tanpa rangkulan dari masyarakat. Pemerintah akan menjadi lebih terbuka transparan dan bertanggung jawab; promosi yang dilakukan secara adil dan merata; dan pencapaian perdamaian yang semakin terselenggara.<sup>104</sup>

Secara sederhana, prinsip ini lebih menekankan pada dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara nyata. Hal tersebut merupakan anti-*thesis* dari model pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada aspek ekonomi. Menurut Korten dalam Jemadu. A (2003), model pembangunan ekonomi yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan miskin serta krisis ekologis yang mengancam masa depan kehidupan manusia dan peradaban dunia.

---

<sup>104</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. Hal. 58-62.